BADAN PUSAT STATISTIK

REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN

SURVEI KHUSUS
STUDI PENYUSUNAN PERUBAHAN INVENTORI
(S K S P P I)
TAHUN 2019



Tujuan Survei

Memperoleh indikator penyusunan perubahan inventori

Dasar Hukum :

1. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan UU No. 16 tahun 1997 Pasal 11 tentang Statistik
2. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh UU No 16 tahun1997 Pasal 21 tentang Statistik
3. Survei tidak memungut biaya apapun
4. Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (UU No.16 Tahun 1997 Pasal 27 tentang Statistik).
5. Data yang akan dipublikasikan merupakan data agregat dan digunakan untuk kepentingan analisis dan perumusan kebijakan ekonomi

Layanan Informasi :
Untuk bantuan cara pengisian, dapat menghubungi :
BPS Provinsi Bidang Neraca & Analisis, Telp. .....
BPS Pusat, Subdit Neraca Modal & Luar Negeri, Telp. 021-3841195 Ext. 7231-7233

Contact Person
Hadi Susanto (hsusanto@bps.go.id), Dyah Soendhari (sundari@bps.go.id)

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu bentuk investasi, penghitungan perubahan inventori/persediaan di suatu negara sangat diperlukan, terutama untuk menunjang penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pengeluaran. Tersedianya data inventori yang lebih akurat dan rinci dapat menjadi bahan referensi bagi BPS dalam penghitungan perubahan inventori dan menjadi informasi yang cukup penting bagi analisis investasi. Bertolak dari pentingnya informasi mengenai perubahan inventori, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei khusus terkait penghitungan komponen perubahan inventori melalui Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI) 2019.

Kegiatan SKSPPI 2019 bertujuan untuk mengumpulkan data inventori di seluruh provinsi di Indonesia. Data yang dikumpulkan adalah data barang-barang inventori menurut lapangan usaha dan jenis komoditas. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan memberikan gambaran pola dan struktur perubahan inventori pada periode waktu tertentu.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan SKSPPI 2019, disusun sebuah buku pedoman SKSPPI 2019. Buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pencacah dalam pelaksanaan lapangan. Selain itu, buku ini juga disusun sebagai pedoman bagi pengawas pelaksanaan lapangan untuk memperoleh hasil yang optimal.

Jakarta, Februari 2019

Subdirektorat Neraca Modal dan Luar Negeri

Direktorat Neraca Pengeluaran

Badan Pusat Statistik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Unit Sampel 2
C. Rancangan Penarikan Sampel 2
D. Pelaksanaan Lapangan dan Jadwal Kegiatan 2
E. Rancangan Kuesioner 3
F. Alokasi Sampel 4
BAB II PETUNJUK PENCACAHAN
Blok I. Keterangan Tempat 12
Blok II. Keterangan Umum 12
Blok III. Nilai Produksi/Pendapatan dan Aset Tahun 2016-2018 14
Blok IV. Nilai Posisi Inventori/Persediaan Akhir Triwulanan Tahun 2016-2019 15
Blok V. Volume Dan Nilai Posisi Inventori/Persediaan Akhir Tahun 2016-2018 17
Blok VI. Catatan 19
Blok VII. Keterangan Petugas 19
Blok VIII. Keterangan Pemberi Informasi 19
BAB III PETUNJUK PENGAWASAN
Blok I. Keterangan Tempat 20
Blok II. Keterangan Umum 21
Blok III. Nilai Produksi/Pendapatan dan Aset Tahun 2016-2018 21
Blok IV. Nilai Posisi Inventori/Persediaan Akhir Triwulanan Tahun 2016-2019 22
Blok V. Volume Dan Nilai Posisi Inventori/Persediaan Akhir Tahun 2016-2018 22
Blok VI. Catatan 23
Blok VII. Keterangan Petugas 24
Blok VIII. Keterangan Pemberi Informasi 24

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inventori merupakan barang persediaan yang dikuasai dan ditahan oleh suatu unit dengan tujuan untuk digunakan sendiri, dijual, atau diberikan pada unit lain di waktu mendatang. Inventori memiliki peran penting dalam keberlangsungan kegiatan perekonomian baik dalam ruang lingkup mikro maupun makro. Dalam ruang lingkup mikro, inventori diperlukan perusahaan untuk memfasilitasi kegiatan produksi dan mengantisipasi permintaan konsumen. Di sisi lain, inventori memberikan beban bagi keuangan perusahaan dengan adanya biaya penyimpanan barang. Dari kedua hal tersebut, perusahaan dituntut untuk menjaga keseimbangan inventori dalam upaya menjaga keberlangsungan kegiatan produksi dan kondisi keuangan perusahaan.

Adapun dalam ruang lingkup makro, inventori merupakan salah satu bagian dari pembentukan modal atau investasi fisik di suatu wilayah. Nilai inventori pada suatu periode atau disebut sebagai posisi inventori menggambarkan bagian dari aset atau kekayaan nasional. Adapun perubahan nilai inventori dari dua periode yang berurutan merupakan salah satu komponen penyusun Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi pengeluaran. Adapun PDB/PDRB merupakan ukuran yang menunjukkan besarnya nilai tambah yang tercipta di suatu wilayah. Walaupun kontribusinya dalam perekonomian tidak terlalu besar, ketersediaan data inventori menjadi informasi yang cukup penting bagi analisis investasi di suatu wilayah.

Selain berperan sebagai komponen penyusun PDB/PDRB dari sisi pengeluaran, inventori juga disajikan sebagai bagian dari konsumsi akhir (*final demand*) yang terletak pada kuadran II Tabel *Input- Output (I-O)*. Pada praktiknya, nilai inventori pada kedua perangkat tersebut masih diperlakukan sebagai komponen residual yang di dalamnya masih mengandung perbedaan statistik yang timbul akibat perbedaan metode penghitungan PDB dengan pendekatan produksi dan pengeluaran. Kondisi ini menyebabkan informasi mengenai inventori sulit untuk dipahami dan dianalisis lebih jauh.

Bertolak dari pentingnya peran inventori dalam perekonomian baik dari lingkup mikro maupun makro, diperlukan ketersediaan data inventori melalui metode penghitungan inventori yang tepat. Kelemahan penghitungan inventori yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini secara bertahap mulai diperbaiki melalui ketersediaan data yang lebih baik. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan informasi inventori yang lebih rinci melalui pelaksanaan Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI). Survei ini bertujuan untuk:

- Memperoleh gambaran mengenai kuantitas dan nilai posisi inventori/persediaan;
- Memperoleh pola dan struktur inventori menurut jenis komoditas dan klasifikasi lapangan usaha;

- Memperoleh informasi mengenai rasio inventori terhadap nilai produksi (*output*) dan polanya pada berbagai lapangan usaha; dan
- Menerapkan SNA 2008 yang berkaitan dengan perubahan inventori.

B. Unit Sampel

Unit sampel SKSPPI 2019 adalah perusahaan yang berbasis *establishment* (kantor pusat, kantor tunggal, kantor cabang). Menurut SNA 2008, perusahaan didefinisikan sebagai suatu unit institusi yang terlibat dalam kegiatan produksi dengan tujuan menghasilkan barang/jasa dan memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Dalam hal ini, perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan yang bergerak di berbagai lapangan usaha dengan cakupan utamanya ditujukan kepada perusahaan yang memiliki inventori/persediaan dan mempunyai laporan keuangan/sistem pencatatan administrasi keuangan yang baik.

SKSPPI 2019 dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Alokasi sampel perusahaan sudah ditentukan untuk setiap kabupaten/kota di seluruh provinsi. Adapun untuk alokasi sampel menurut kategori lapangan usaha di setiap kabupaten/kota dilakukan secara proporsional sesuai dengan kontribusi lapangan usaha tersebut terhadap PDRB kabupaten/kota. Perusahaan yang menjadi sampel adalah seluruh jenis perusahaan, seperti perusahaan swasta, perusahaan publik (BUMN dan BUMD), dan UMKM. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sampel adalah perusahaan tersebut hanya melakukan kegiatan usaha di wilayah pencacahan atau perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha di banyak wilayah namun mampu memberikan informasi khusus di wilayah pencacahan saja. Perusahaan yang dapat dijadikan sampel antara lain Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bulog, industri pengolahan makanan, restoran, dan sebagainya.

C. Rancangan Penarikan Sampel

Penarikan sampel pada SKSPPI 2019 dilakukan secara *purposive*, namun tetap mempertimbangkan keadaan responden mengenai dapat tidaknya perusahaan untuk memberikan data secara rinci. Penggantian responden dapat dilakukan atas persetujuan penanggung jawab pelaksana harian (koordinator) dengan memperhatikan hal-hal seperti lapangan usaha yang sama, keterwakilan usaha/perusahaan dalam suatu lapangan usaha, dan besar kecilnya usaha.

D. Pelaksanaan Lapangan dan Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan SKSPPI 2019 dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Nerwilis) di setiap provinsi yang bersesuaian. Pelaksanaan pencacahan dapat dilakukan oleh kepala seksi/staf inti Nerwilis atau mitra yang ditunjuk melalui surat penugasan dengan kriteria pendidikan minimal D3/S1 sederajat. Adapun pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan dilakukan oleh kepala seksi dan/atau staf inti Nerwilis yang ditunjuk.

Petugas pencacah yang telah diberikan surat tugas akan mendatangi perusahaan yang terpilih menjadi sampel. Setiap perusahaan sampel akan didatangi oleh petugas

sebanyak 3 (tiga) kali kunjungan. Jika pada saat pencacahan perusahaan sampel tidak ditemukan, tutup, dan lain sebagainya, perlu dilakukan penggantian sampel. Sampel diganti dengan cara mencari perusahaan lain yang bergerak di lapangan usaha yang sama dan skala perusahaan yang hampir sama.

Hasil pengentrian kuesioner pencacahan lapangan melalui program entri data perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pengawas, yakni kepala seksi dan/atau staf inti Nerwilis sebelum diproses lebih lanjut oleh BPS pusat. Hasil pengentrian akan melalui proses *editing* dan validasi oleh staf di Subdirektorat Neraca Modal dan Luar Negeri. Setelah itu, data yang diperoleh dari hasil pencacahan akan diolah melalui sistem komputerisasi untuk memperoleh informasi terkait inventori yang dibutuhkan.

Kegiatan SKSPPI 2019 diawali dengan pelatihan petugas pencacahan. Adapun pelaksanaan pencacahan mulai dilakukan pada Bulan Maret sampai dengan Bulan Juni tahun 2019. Secara lebih lengkap, jadwal pelaksanaan kegiatan SKSPPI 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

Persiapan dan Perencanaan

1.	Penyusunan metodologi, pedoman, dan daftar isian	Januari - Februari 2019
2.	Penggandaan pedoman dan daftar isian	Februari 2019
3.	Pelatihan instruktur pelatihan petugas pencacahan	Februari 2019
4.	Pelatihan petugas pencacahan di daerah	Maret 2019

Pelaksanaan

1.	Pengambilan sampel	Maret - April 2019
2.	Pencacahan	Maret - Juni 2019
3.	Pemeriksaan	Maret - Juli 2019
4.	Pengentrian data kuesioner hasil pencacahan	Juli - Agustus 2019

Pengolahan

1.	Penyusunan program entri komputer	Februari 2019
2.	Pengolahan hasil entri	September 2019
3.	Tabulasi	Oktober 2019
4.	Penulisan laporan hasil	November - Desember 2019

E. Rancangan Kuesioner

Kuesioner SKSPPI 2019 terdiri dari 8 blok. Rincian informasi yang ada pada setiap blok dapat diuraikan sebagai berikut:

Blok I. Mengetahui informasi tentang lokasi dan identitas perusahaan yang dicacah.

Blok II. Mengetahui informasi keterangan umum perusahaan, diantaranya kegiatan usaha perusahaan, tahun dimulainya kegiatan usaha, dan klasifikasi perusahaan berdasarkan badan hukum/usaha dan kepemilikan perusahaan.

Blok III. Mengetahui informasi nilai produksi/pendapatan dan nilai aset perusahaan.

Blok IV. Mengetahui informasi nilai posisi inventori/persediaan secara triwulanan.

Blok V. Mengetahui informasi volume dan nilai posisi inventori/persediaan menurut jenis komoditas pada akhir tahun.
Blok VI. Mengetahui informasi catatan yang diperlukan.
Blok VII. Mengetahui informasi petugas pencacahan, pengawas pencacahan, dan waktu pelaksanaan pencacahan dan pengawasan.
Blok VIII. Mengetahui keterangan pemberi informasi untuk keperluan konfirmasi data dan menjamin keaslian data.

F. Alokasi Sampel

Jumlah sampel untuk kegiatan SKSPPI tahun 2019 adalah sebanyak 10.741 perusahaan. Alokasi sampel SKSPPI tahun 2019 ditentukan untuk setiap kabupaten/kota di seluruh provinsi. Jumlah sampel untuk setiap provinsi dapat dirinci sebagai berikut.

No.	Provinsi	Jumlah Sampel	No.	Provinsi	Jumlah Sampel
1	Aceh	505	18	Nusa Tenggara Barat	185
2	Sumatera Utara	695	19	Nusa Tenggara Timur	345
3	Sumatera Barat	405	20	Kalimantan Barat	310
4	Riau	260	21	Kalimantan Tengah	310
5	Jambi	245	22	Kalimantan Selatan	275
6	Sumatera Selatan	375	23	Kalimantan Timur	200
7	Bengkulu	210	24	Kalimantan Utara	115
8	Lampung	325	25	Sulawesi Utara	320
9	Kep. Bangka Belitung	145	26	Sulawesi Tengah	275
10	Kepulauan Riau	145	27	Sulawesi Selatan	520
11	DKI Jakarta	265	28	Sulawesi Tenggara	355
12	Jawa Barat	585	29	Gorontalo	130
13	Jawa Tengah	725	30	Sulawesi Barat	130
14	DI Yogyakarta	115	31	Maluku	245
15	Jawa Timur	830	32	Maluku Utara	210
16	Banten	180	33	Papua Barat	232
17	Bali	195	34	Papua	379
Jumlah					10.741

Adapun jumlah sampel untuk setiap kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut.

Kode Provinsi	Kode & Nama Kab/Kota	Jumlah Sampel
11	Aceh	
	01 Simeulue	15
	02 Aceh Singkil	15
	03 Aceh Selatan	20
	04 Aceh Tenggara	20
	05 Aceh Timur	20
	06 Aceh Tengah	20
	07 Aceh Barat	30
	08 Aceh Besar	30
	09 Pidie	30
	10 Bireuen	30
	11 Aceh Utara	30
	12 Aceh Barat Daya	20
	13 Gayo Lues	15
	14 Aceh Tamiang	20
	15 Nagan Raya	20
	16 Aceh Jaya	15
	17 Bener Meriah	20
	18 Kab. Pidie Jaya	15
	71 Banda Aceh	30
	72 Sabang	15
	73 Langsa	30
	74 Lhokseumawe	30
	75 Kota Subulussalam	15
12	Sumatera Utara	
	01 Nias	5
	02 Mandailing Natal	20
	03 Tapanuli Selatan	15
	04 Tapanuli Tengah	20
	05 Tapanuli Utara	20
	06 Toba Samosir	15
	07 Labuhan Batu	30
	08 Asahan	30
	09 Simalungun	30
	10 Dairi	20
	11 Karo	30
	12 Deli Serdang	30
	13 Langkat	30
	14 Nias Selatan	15
	15 Humbang Hasundutan	15

Kode Provinsi	Kode & Nama Kab/Kota	Jumlah Sampel
12	Sumatera Utara	
	19 Kab. Batu Bara	20
	20 Padang Lawas Utara	15
	21 Padang Lawas	15
	22 Labuhan Batu Selatan	20
	23 Labuhan Batu Utara	20
	24 Nias Utara	15
	25 Nias Barat	5
	71 Sibolga	20
	72 Tanjung Balai	20
	73 Pematang Siantar	30
	74 Tebing Tinggi	20
	75 Medan	30
	76 Binjai	30
	77 Padang Sidempuan	30
	78 Gunung Sitoli	20
13	Sumatera Barat	
	01 Kepulauan Mentawai	15
	02 Pesisir Selatan	20
	03 Solok	20
	04 Sawah Lunto/Sijunjung	15
	05 Tanah Datar	20
	06 Padang Pariaman	30
	07 Agam	30
	08 Lima Puluh Koto	20
	09 Pasaman	15
	10 Solok Selatan	15
	11 Dharmas Raya	20
	12 Pasaman Barat	30
	71 Kota Padang	30
	72 Kota Solok	20
	73 Kota Sawah Lunto	15
	74 Kota Padang Panjang	15
	75 Kota Bukit Tinggi	30
	76 Kota Payakumbuh	30
	77 Kota Pariaman	15
14	Riau	
	01 Kuantan Singingi	15
	02 Indragiri Hulu	20
	03 Indragiri Hilir	15

	16 Pakpak Bharat	15
	17 Samosir	15
	18 Serdang Bedagai	30

	04 Pelalawan	15
	05 Siak	20
	06 Kampar	30

Kode Provinsi	Kode & Nama Kab/Kota	Jumlah Sampel
14	Riau	
	07 Rokan Hulu	20
	08 Bengkalis	30
	09 Rokan Hilir	20
	10 Kepulauan Meranti	15
	71 Pekan Baru	30
	73 Dumai	30
15	Jambi	
	01 Kerinci	15
	02 Merangin	30
	03 Sarolangun	20
	04 Batang Hari	20
	05 Muaro Jambi	20
	06 Tanjung Jabung Timur	15
	07 Tanjung Jabung Barat	30
	08 Tebo	20
	09 Bungo	30
	71 Kota Jambi	30
	72 Kota Sungai Penuh	15
16	Sumatera Selatan	
	01 Ogan Komering Ulu	30
	02 Ogan Komering Ilir	20
	03 Muara Enim	30
	04 Lahat	20
	05 Musi Rawas	15
	06 Musi Banyuasin	20
	07 Banyuasin	30
	08 OKU Selatan	15
	09 OKU Timur	20
	10 Ogan Ilir	20
	11 Kab. Empat Lawang	15
	12 Penukal Abab Lematang Ilir	15
	13 Musi Rawas Utara	15
	71 Palembang	30
	72 Prabumulih	30
	73 Pagar Alam	20
	74 Lubuk Linggau	30
17	Bengkulu	
	01 Bengkulu Selatan	20
	02 Rejang Lebong	30

Kode Provinsi	Kode & Nama Kab/Kota	Jumlah Sampel
17	Bengkulu	
	06 Mukomuko	20
	07 Lebong	15
	08 Kapahiang	15
	09 Bengkulu Tengah	15
	71 Kota Bengkulu	30
18	Lampung	
	01 Lampung Barat	15
	02 Tanggamus	20
	03 Lampung Selatan	30
	04 Lampung Timur	30
	05 Lampung Tengah	30
	06 Lampung Utara	30
	07 Way Kanan	20
	08 Tulang Bawang	20
	09 Pesawaran	20
	10 Pringsewu	20
	11 Mesuji	15
	12 Tulangbawang Barat	15
	13 Pesisir Barat	15
	71 Kota Bandar Lampung	30
	72 Metro	15
19	Kep. Bangka Belitung	
	01 Bangka	20
	02 Belitung	30
	03 Bangka Barat	15
	04 Bangka Tengah	20
	05 Bangka Selatan	15
	06 Belitung Timur	15
	71 Kota Pangkal Pinang	30
21	Kepulauan Riau	
	01 Karimun	20
	02 Bintan	20
	03 Natuna	15
	04 Lingga	15
	05 Kepulauan Anambas	15
	71 Kota Batam	30
	72 Kota Tanjung Pinang	30
31	DKI Jakarta	
	01 Adm. Kepulauan Seribu	15

	03 Bengkulu Utara	30
	04 Kaur	15
	05 Seluma	20

	71 Jakarta Selatan	50
	72 Jakarta Timur	50
	73 Jakarta Pusat	50

Kode Provinsi	Kode & Nama Kab/Kota	Jumlah Sampel
31	DKI Jakarta	
	74 Jakarta Barat	50
	75 Jakarta Utara	50
32	Jawa Barat	
	01 Bogor	30
	02 Sukabumi	20
	03 Cianjur	20
	04 Bandung	30
	05 Garut	20
	06 Tasikmalaya	15
	07 Ciamis	15
	08 Kuningan	15
	09 Cirebon	30
	10 Majalengka	20
	11 Sumedang	15
	12 Indramayu	20
	13 Subang	20
	14 Purwakarta	20
	15 Karawang	30
	16 Bekasi	30
	17 Kab. Bandung Barat	15
	18 Pangandaran	15
	71 Kota Bogor	30
	72 Kota Sukabumi	15
	73 Kota Bandung	30
	74 Kota Cirebon	20
	75 Kota Bekasi	30
	76 Kota Depok	30
	77 Kota Cimahi	15
	78 Kota Tasikmalaya	20
	79 Kota Banjar	15
33	Jawa Tengah	
	01 Cilacap	30
	02 Banyumas	30
	03 Purbalingga	20
	04 Banjarnegara	15
	05 Kebumen	20
	06 Purworejo	15
	07 Wonosobo	20
	08 Magelang	20

Kode Provinsi	Kode & Nama Kab/Kota	Jumlah Sampel
33	Jawa Tengah	
	12 Wonogiri	15
	13 Karanganyar	20
	14 Sragen	20
	15 Grobogan	15
	16 Blora	15
	17 Rembang	15
	18 Pati	30
	19 Kudus	30
	20 Jepara	30
	21 Demak	15
	22 Semarang	20
	23 Temanggung	15
	24 Kendal	20
	25 Batang	15
	26 Pekalongan	20
	27 Pemalang	20
	28 Tegal	20
	29 Brebes	15
	71 Kota Magelang	15
	72 Kota Surakarta	30
	73 Kota Salatiga	15
	74 Kota Semarang	30
	75 Kota Pekalongan	15
	76 Kota Tegal	20
34	D.I. Yogyakarta	
	01 Kulon Progo	15
	02 Bantul	20
	03 Gunung Kidul	20
	04 Sleman	30
	71 Kota Yogyakarta	30
35	Jawa Timur	
	01 Pacitan	15
	02 Ponorogo	20
	03 Trenggalek	15
	04 Tulungagung	20
	05 Blitar	30
	06 Kediri	30
	07 Malang	30
	08 Lumajang	20

	09	Boyolali	20		09	Jember	30
	10	Klaten	30		10	Banyuwangi	30
	11	Sukoharjo	30		11	Bondowoso	20

Kode Provinsi	Kode & Nama Kab/Kota		Jumlah Sampel
35	Jawa Timur		
	12	Situbondo	15
	13	Probolinggo	20
	14	Pasuruan	30
	15	Sidoarjo	30
	16	Mojokerto	20
	17	Jombang	30
	18	Nganjuk	20
	19	Madiun	15
	20	Magetan	15
	21	Ngawi	20
	22	Bojonegoro	30
	23	Tuban	30
	24	Lamongan	30
	25	Gresik	30
	26	Bangkalan	20
	27	Sampang	20
	28	Pamekasan	20
	29	Sumenep	20
	71	Kota Kediri	15
	72	Kota Blitar	15
	73	Kota Malang	20
	74	Kota Probolinggo	15
	75	Kota Pasuruan	15
	76	Kota Mojokerto	15
	77	Kota Madiun	15
	78	Kota Surabaya	30
	79	Kota Batu	15
36	Banten		
	01	Pandeglang	15
	02	Lebak	15
	03	Tangerang	30
	04	Serang	20
	71	Kota Tangerang	30
	72	Kota Cilegon	20
	73	Kota Serang	20
	74	Kota Tangerang Selatan	30
51	Bali		
	01	Jembrana	15
	02	Tabanan	20

Kode Provinsi	Kode & Nama Kab/Kota		Jumlah Sampel
51	Bali		
	06	Bangli	15
	07	Karang Asem	20
	08	Buleleng	20
	71	Kota Denpasar	30
52	Nusa Tenggara Barat		
	01	Lombok Barat	20
	02	Lombok Tengah	20
	03	Lombok Timur	20
	04	Sumbawa	20
	05	Dompu	15
	06	Bima	15
	07	Sumbawa Barat	15
	08	Lombok Utara	15
	71	Kota Mataram	30
	72	Kota Bima	15
53	Nusa Tenggara Timur		
	01	Sumba Barat	15
	02	Sumba Timur	15
	03	Kupang	15
	04	Timor Tengah Selatan	15
	05	Timor Tengah Utara	15
	06	Belu	15
	07	Alor	15
	08	Lembata	15
	09	Flores Timur	15
	10	Sikka	15
	11	Ende	15
	12	Ngada	15
	13	Manggarai	15
	14	Rote Ndao	15
	15	Manggarai Barat	15
	16	Sumba Tengah	15
	17	Sumba Barat Daya	15
	18	Nagekeo	15
	19	Manggarai Timur	15
	20	Sabu Raijua	15
	21	Malaka	15
	71	Kota Kupang	30
61	Kalimantan Barat		

	03	Badung	30		01	Sambas	20
	04	Gianyar	30		02	Bengkayang	20
	05	Klungkung	15		03	Landak	15

Kode Provinsi	Kode & Nama Kab/Kota		Jumlah Sampel
61	Kalimantan Barat		
	04	Pontianak	20
	05	Sanggau	30
	06	Ketapang	30
	07	Sintang	20
	08	Kapuas Hulu	20
	09	Sekadau	15
	10	Melawi	15
	11	Kab. Kayong Utara	15
	12	Kubu Raya	30
	71	Kota Pontianak	30
	72	Kota Singkawang	30
62	Kalimantan Tengah		
	01	Kotawaringin Barat	30
	02	Kotawaringin Timur	30
	03	Kapuas	30
	04	Barito Selatan	20
	05	Barito Utara	30
	06	Sukamara	15
	07	Lamandau	15
	08	Seruyan	20
	09	Katingan	20
	10	Pulang Pisang	15
	11	Gunung Mas	20
	12	BaritoTimur	20
	13	Murung Raya	15
	71	Kota Palangkaraya	30
63	Kalimantan Selatan		
	01	Tanah Laut	20
	02	Kota Baru	20
	03	Banjar	30
	04	Barito Kuala	20
	05	Tapin	15
	06	Hulu Sungai Selatan	15
	07	Hulu Sungai Tengah	15
	08	Hulu Sungai Utara	15
	09	Tabalong	20
	10	Tanah Bumbu	30
	11	Balangan	15
	71	Kota Banjarmasin	30
	72	Kota Banjar Baru	30
64	Kalimantan Timur		

Kode Provinsi	Kode & Nama Kab/Kota		Jumlah Sampel
64	Kalimantan Timur		
	02	Kutai Barat	15
	03	Kutai Kartanegara	30
	04	Kutai Timur	20
	05	Berau	20
	09	Penajam Paser Utara	15
	11	ahakam Ulu	5
	71	ota Balikpapan	30
	72	ota Samarinda	30
	74	ota Bontang	20
65	Kalimantan utara		
	01	Malinau	20
	02	Bulungan	20
	03	Tana Tidung	15
	04	Nunukan	30
	71	Kota Tarakan	30
71	Sulawesi Utara		
	01	Bolaang Mongondow	20
	02	Minahasa	30
	03	Kepulauan Sangihe	20
	04	Kepulauan Talaud	15
	05	Minahasa Selatan	20
	06	Minahasa Utara	30
	07	Bolaang Mongondow Utara	15
	08	Siau Tagolandang Biaro	20
	09	Minahasa Tenggara	15
	10	Bolaang Mongondow Selatan	10
	11	Bolaang Mongondow Timur	15
	71	Kota Manado	30
	72	Kota Bitung	30
	73	Kota Tomohon	20
	74	Kota Kotamobagu	30
72	Sulawesi Tengah		
	01	Banggai Kepulauan	15
	02	Banggai	30
	03	Morowali	20
	04	Poso	20
	05	Donggala	20
	06	Toli Toli	30
	07	Buol	15
	08	Parigi Moutong	30
	09	Tojo Una Una	15

	01 Pasir	15

	10 Sigi	15

Kode Provinsi	Kode & Nama Kab/Kota	Jumlah Sampel
72	Sulawesi Tengah	
	11 Banggai Laut	15
	12 Morowali Utara	20
	71 Kota Palu	30
73	Sulawesi Selatan	
	01 Selayar	15
	02 Bulukumba	20
	03 Bantaeng	15
	04 Jeneponto	20
	05 Takalar	20
	06 Gowa	30
	07 Sinjai	15
	08 Maros	30
	09 Pangkajene dan Kepulauan	20
	10 Barru	15
	11 Bone	30
	12 Soppeng	15
	13 Wajo	30
	14 Sidenreng Rappang	20
	15 Pinrang	20
	16 Enrekang	20
	17 Luwu	15
	18 Tana Toraja	15
	22 Luwu Utara	20
	25 Luwu Timur	30
	26 Toraja Utara	15
	71 Kota Makasar	30
	72 Kota Pare Pare	30
	73 Kota Palopo	30
74	Sulawesi Tenggara	
	01 Buton	20
	02 Muna	30
	03 Konawe	30
	04 Kolaka	30
	05 Konawe Selatan	30
	06 Bombana	20
	07 Wakatobi	20
	08 Kolaka Utara	20
	09 Kab. Buton Utara	15
	10 Kab. Konawe Utara	20
	11 Kolaka Timur	20
	12 Konawe Kepulauan	5

Kode Provinsi	Kode & Nama Kab/Kota	Jumlah Sampel
74	Sulawesi Tenggara	
	14 Buton Tengah	15
	15 Buton Selatan	5
	71 Kota Kendari	30
	72 Kota Baubau	30
75	Gorontalo	
	01 Boalemo	20
	02 Gorontalo	30
	03 Pahuwato	20
	04 Bone Bolango	15
	05 Kab. Gorontalo Utara	15
	71 Kota Gorontalo	30
76	Sulawesi Barat	
	01 Majene	20
	02 Polewali Mandar	30
	03 Mamasa	15
	04 Mamuju	30
	05 Mamuju Utara	20
	06 Mamuju Tengah	15
81	Maluku	
	01 Maluku Tenggara Barat	20
	02 Maluku Tenggara	20
	03 Maluku Tengah	30
	04 Buru	30
	05 Kepulauan Aru	30
	06 Seram Bagian Barat	20
	07 Seram Bagian Timur	15
	08 Maluku Barat Daya	15
	09 Buru Selatan	15
	71 Kota Ambon	30
	72 Kota Tual	20
82	Maluku Utara	
	01 Halmahera Barat	20
	02 Halmahera Tengah	15
	03 Kepulauan Sula	20
	04 Halmahera Selatan	30
	05 Halmahera Utara	30
	06 Halmahera Timur	15
	07 Pulau Morotai	15
	08 ulau Taliabu	15
	71 Kota Ternate	30
	72 Kota Tidore Kepulauan	20

	13 Muna Barat	15

Kode Provinsi	Kode & Nama Kab/Kota	Jumlah Sampel
91	Papua Barat	
	01 Fakfak	30
	02 Kaimana	20
	03 Teluk Wondama	15
	04 Teluk Bintuni	20
	05 Manokwari	30
	06 Sorong Selatan	20
	07 Sorong	30
	08 Raja Ampat	20
	09 Tambrauw	5
	10 Maybrat	5
	11 Manokwari Selatan	5
	12 Pegunungan Arfak	2
	71 Kota Sorong	30
94	Papua	
	01 Merauke	15
	02 Jayawijaya	15
	03 Jayapura	15
	04 Nabire	15
	08 Yapen Waropen	15
	09 Biak Numfor	15
	10 Paniai	15
	11 Puncak Jaya	15
	12 Mimika	15

Kode Provinsi	Kode & Nama Kab/Kota	Jumlah Sampel
94	Papua	
	13 Boven Digoel	15
	14 Mappi	15
	15 Asmat	15
	16 Yahukimo	15
	17 Pegunungan Bintang	15
	18 Tolikara	10
	19 Sarmi	15
	20 Keerom	15
	26 Waropen	15
	27 Supiori	10
	28 Mamberamo Raya	10
	29 Nduga	10
	30 Lanny Jaya	15
	31 Memberamo Tengah	5
	32 Yalimo	10
	33 Puncak	15
	34 Dogiyai	3
	35 Intan Jaya	1
	36 Deiyai	5
	71 Kota Jayapura	30
	Jumlah	10.741

BAB II
PETUNJUK PENCACAHAN

Pada bab ini diberikan penjelasan mengenai petunjuk pencacahan yang mencakup penjelasan blok pertanyaan dan tata cara pengisian kuesioner. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pencacah dalam melakukan tugasnya.

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan identitas perusahaan yang dicacah. Identitas ini dapat digunakan untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan mempermudah proses pengolahan hasil pencacahan.

Rincian (1): Provinsi

Isikan nama dan kode provinsi lokasi perusahaan yang dicacah.

Rincian (2): Kabupaten/Kota

Isikan nama dan kode kabupaten/kota lokasi perusahaan yang dicacah.

Rincian (3): Nomor Urut Perusahaan

Isikan nomor urut perusahaan yang dicacah. Nomor urut perusahaan diisi oleh petugas BPS Kab/Kota. Nomor urut perusahaan di suatu kabupaten/kota harus berurutan dan tidak boleh ada pengulangan.

Rincian (4): Nama Perusahaan

Isikan nama lengkap perusahaan yang dicacah.

Rincian (5): Alamat Kantor dan No. Telepon

Isikan alamat lengkap perusahaan yang dicacah, yakni mencakup nama jalan, RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan serta nomor telepon.

BLOK II. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui keterangan umum perusahaan, diantaranya kegiatan usaha utama perusahaan, tahun dimulainya kegiatan usaha, bentuk badan hukum/usaha perusahaan, dan jenis perusahaan berdasarkan kepemilikan.

Rincian (1): Kegiatan Usaha yang Dilakukan

Isikan nama dan kode kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan berdasarkan 17 kategori lapangan usaha. Jika perusahaan memiliki lebih dari satu jenis kegiatan usaha, pilih kegiatan utama perusahaan dengan nilai produksi/pendapatan terbesar.

Kode	Jenis Kegiatan Usaha	Subjenis Kegiatan Usaha
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	
B	Pertambangan dan Penggalian	
C	Industri Pengolahan	10 Industri Makanan
		11 Industri Minuman
		12 Industri Pengolahan Tembakau
		13 Industri Tekstil
		14 Industri Pakaian Jadi
		15 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
		16 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
		17 Industri Kertas dan Barang dari Kertas
		18 Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman
		19 Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi
		20 Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
		21 Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional
		22 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
		23 Industri Barang Galian Bukan Logam
		24 Industri Logam Dasar
		25 Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya
		26 Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik
		27 Industri Peralatan Listrik
		28 Industri Mesin dan Perlengkapan ytdl
		29 Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer
		30 Industri Alat Angkutan Lainnya
		31 Industri Furnitur
		32 Industri Pengolahan Lainnya
		33 Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	
E	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan & Daur Ulang Sampah, Remediasi	
F	Konstruksi	
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	
H	Pengangkutan dan Pergudangan	

Kode	Jenis Kegiatan Usaha	Subjenis Kegiatan Usaha
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	
J	Informasi dan Komunikasi	
K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	
L	Real Estat	
M	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	
N	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan	
P	Jasa Pendidikan	
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	
S	Jasa Lainnya	

Rincian (2): Tahun Dimulainya Kegiatan Usaha

Isikan tahun dimulainya kegiatan usaha perusahaan, yakni tahun pertama kali perusahaan tersebut memproduksi barang/jasa secara komersial.

Rincian (3): Bentuk Badan Hukum/Usaha Perusahaan

Lingkari dan isikan kode bentuk badan hukum/usaha perusahaan.

Kode:
- → 1. PT
- → 2. CV
- → 3. Firma
- → 4. Lainnya (tuliskan bentuk badan hukum/usaha perusahaan)

Rincian (4): Jenis Perusahaan berdasarkan Kepemilikan

Lingkari dan isikan kode jenis perusahaan berdasarkan kepemilikan terbesar.

Kode:
- → 1. BUMN/BUMD
- → 2. Swasta Nasional
- → 3. Swasta Asing

BLOK III. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN DAN ASET TAHUN 2016-2018

Blok ini bertujuan untuk mengetahui nilai produksi dan nilai aset perusahaan setiap tahun selama tahun 2016-2018. Pengisian blok ini menggunakan satuan ribu rupiah.

Nilai produksi mencakup nilai seluruh barang yang diproduksi pada periode tertentu, antara lain:

- Barang yang sudah terjual (tunai maupun kredit) maupun belum terjual;
- Barang yang masih dalam proses (setengah jadi);
- Barang yang dikonsumsi sendiri; dan
- Barang yang diberikan kepada pihak lain.

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul karena adanya aktivitas kegiatan/usaha. Untuk kegiatan perdagangan, pendapatan adalah selisih nilai jual dan nilai beli.

Aset adalah seluruh kepemilikan/harta perusahaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai uang dan memberikan manfaat bagi pemiliknya di masa mendatang.

Kolom (2) Rincian (1): Nilai Produksi/Pendapatan Tahun 2016

Isikan nilai produksi/pendapatan perusahaan yang dicacah selama tahun 2016 dalam ribu rupiah.

Kolom (3) Rincian (1): Nilai Produksi/Pendapatan Tahun 2017

Isikan nilai produksi/pendapatan perusahaan yang dicacah selama tahun 2017 dalam ribu rupiah.

Kolom (4) Rincian (1): Nilai Produksi/Pendapatan Tahun 2018

Isikan nilai produksi/pendapatan perusahaan yang dicacah selama tahun 2018 dalam ribu rupiah.

Kolom (2) Rincian (2): Nilai Produksi/Pendapatan Triwulan IV Tahun 2016

Isikan nilai produksi/pendapatan perusahaan yang dicacah selama triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2016 dalam ribu rupiah.

Kolom (3) Rincian (2): Nilai Produksi/Pendapatan Triwulan IV Tahun 2017

Isikan nilai produksi/pendapatan perusahaan yang dicacah selama triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2017 dalam ribu rupiah.

Kolom (4) Rincian (2): Nilai Produksi/Pendapatan Triwulan IV Tahun 2018

Isikan nilai produksi/pendapatan perusahaan yang dicacah selama triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2018 dalam ribu rupiah.

Kolom (2) Rincian (3): Nilai Aset Tahun 2016

Isikan nilai aset total perusahaan yang terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar menurut harga perolehan aset pada akhir tahun 2016 dalam ribu rupiah.

Kolom (3) Rincian (3): Nilai Aset Tahun 2017

Isikan nilai aset total perusahaan yang terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar menurut harga perolehan aset pada akhir tahun 2017 dalam ribu rupiah.

Kolom (4) Rincian (3): Nilai Aset Tahun 2018

Isikan nilai aset total perusahaan yang terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar menurut harga perolehan aset pada akhir tahun 2018 dalam ribu rupiah.

BLOK IV. NILAI POSISI INVENTORI/PERSEDIAAN AKHIR TRIWULANAN TAHUN 2016-2019

Blok ini bertujuan untuk mengetahui nilai posisi inventori/persediaan setiap akhir triwulan selama tahun 2016-2019.

Inventori adalah persediaan yang dikuasai oleh unit yang menghasilkan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, dijual, atau diberikan kepada pihak lain atau persediaan yang berasal dari pihak lain yang akan digunakan sebagai input antara atau dijual kembali tanpa mengalami proses lebih lanjut.

Jenis-jenis Inventori:

1. **Bahan baku dan penolong**
   Semua barang yang dikuasai oleh perusahaan yang akan digunakan sebagai input antara dalam kegiatan produksi. Contoh: bahan bakar, bahan baku industri, bahan pertanian, bahan kemasan, bahan makanan, peralatan kantor.
2. ***Work in progress* (barang dalam penyelesaian)**
   Barang/jasa hasil produksi perusahaan yang belum selesai diproses/dikerjakan dan tidak dalam kondisi yang siap untuk dijual/diberikan kepada unit lain. Jenis inventori ini biasanya dimiliki oleh perusahaan di berbagai lapangan usaha, terutama lapangan usaha pertanian, industri pengolahan yang memproduksi aset tetap seperti kapal, konstruksi yang sedang membangun tempat tinggal, jasa pembuatan film, dan lain sebagainya yang membutuhkan masa produksi lebih dari satu tahun.
3. **Barang jadi**
   Barang/jasa hasil produksi perusahaan yang sudah selesai diproses/dikerjakan dan sudah dalam kondisi yang siap untuk dijual/diberikan kepada unit lain, namun masih tertahan di perusahaan tersebut.
4. **Barang untuk dijual kembali**
   Barang yang biasanya diperoleh perusahaan perdagangan dengan tujuan dijual kembali. Barang ini tidak diproses lagi oleh perusahaan yang membeli, kecuali mengubah bentuk tampilan agar lebih menarik.
5. **Inventori Militer**
   Barang militer sekali pakai, kecuali barang dengan kemampuan sangat merusak.

Kolom (2): Nilai Posisi Inventori/Persediaan Setiap Akhir Triwulan 1 Selama Tahun 2016-2019

Isikan nilai posisi inventori/persediaan total setiap akhir triwulan 1 selama tahun 2016-2019 dalam ribu rupiah.

Kolom (3): Nilai Posisi Inventori/Persediaan Setiap Akhir Triwulan 2 Selama Tahun 2016-2018

Isikan nilai posisi inventori/persediaan total setiap akhir triwulan 2 selama tahun 2016-2018 dalam ribu rupiah.

Kolom (4): Nilai Posisi Inventori/Persediaan Setiap Akhir Triwulan 3 Selama Tahun 2016-2018

Isikan nilai posisi inventori/persediaan total setiap akhir triwulan 3 selama tahun 2016-2018 dalam ribu rupiah.

Kolom (5): Nilai Posisi Inventori/Persediaan Setiap Akhir Triwulan 4 Selama Tahun 2016-2018

Isikan nilai posisi inventori/persediaan total setiap akhir triwulan 4 selama tahun 2016-2018 dalam ribu rupiah.

BLOK V. VOLUME DAN NILAI POSISI INVENTORI/PERSEDIAAN AKHIR TAHUN 2016-2018

Blok ini bertujuan untuk untuk mengetahui rincian komoditas inventori beserta volume dan nilainya setiap akhir tahun selama tahun 2016-2018.

Kolom (2): Nama Komoditas

Isikan rincian nama komoditas inventori/persediaan yang dimiliki oleh perusahaan.

Kolom (3): 3 Digit KBLI

Isikan kode komoditas inventori/persediaan yang bersesuaian menurut 3 digit kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009.

KODE	DESKRIPSI	KODE	DESKRIPSI	KODE	DESKRIPSI	KODE	DESKRIPSI
011	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM	105	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU, PRODUK DARI SUSU DAN ES KRIM	222	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	281	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM
012	PERTANIAN TANAMAN TAHUNAN	106	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI	231	INDUSTRI KACA DAN BARANG DARI KACA	282	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS
014	PETERNAKAN	107	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	239	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA	291	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
021	PENGUSAHAAN HUTAN	108	INDUSTRI MAKANAN HEWAN	241	INDUSTRI LOGAM DASAR	309	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL
031	PERIKANAN TANGKAP	110	INDUSTRI MINUMAN	251	INDUSTRI BARANG LOGAM DAN JASA PEMBUATAN BARANG LOGAM	310	INDUSTRI FURNITUR
032	PERIKANAN BUDIDAYA	120	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	262	INDUSTRI KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	321	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DAN BARANG BERHARGA
051	PERTAMBANGAN BATU BARA	131	INDUSTRI TEKSTIL, PAKAIAN JADI DAN PERLENGKAPANNYA, BUKAN PAKAIAN JADI DARI KULIT BERBULU	264	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK	322	INDUSTRI ALAT MUSIK
081	PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT	151	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI	265	INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL DAN ALAT UKUR WAKTU	323	INDUSTRI ALAT OLAHRAGA
089	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL	161	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU DAN BARANG DARI KAYU	267	INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA	325	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPANNYA
101	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING	170	INDUSTRI KERTAS DAN PENCETAKAN	268	INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK	400	KONSTRUKSI

KODE	DESKRIPSI	KODE	DESKRIPSI	KODE	DESKRIPSI	KODE	DESKRIPSI
102	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR	192	INDUSTRI PRODUK PENGILANGAN MINYAK BUMI	271	INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, TRANSFORMATOR DAN PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK		
103	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	201	INDUSTRI BAHAN KIMIA, FARMASI, DAN PRODUK OBAT	272	INDUSTRI BATU BATERAI, AKUMULATOR LISTRIK, KABEL, DAN PERLENGKAPANNYA		
104	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI	221	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	275	INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA		

Kolom (4): Kode Satuan Volume

Isikan kode satuan volume inventori/persediaan yang bersesuaian.

Kode Satuan Volume	Keterangan	Kode Satuan Volume	Keterangan
1	Bal = 1.250 m = 180 kg	8	Metrik ton = 0,98421 long ton = 1.000
2	Barel = 158,99 liter = 1/6,2898 m^3	9	Ounze (oz) = 28,31 gr
3	Bata = 500 gram	10	Pound (lb) = 0,454 kg
4	Batang (untuk sabun: 400 gram)	20	Ton = 1.000 kg
5	Botol = 700 cc	30	Zak = 40 kg; 50 kg (untuk semen)
6	Liter = 0,80 kg (untuk beras)	99	Lainnya (sebutkan)
7	Long ton = 1.016,05 kg		

Kolom (5): Kode Jenis Inventori

Isikan kode jenis komoditas inventori/persediaan yang bersesuaian.

Kode Jenis Inventori	Keterangan
1	Bahan baku dan penolong
2	Barang dalam proses
3	Barang jadi
4	Suku cadang (*sparepart*)

Kolom (6): Volume Posisi Inventori/Persediaan 31 Desember 2016

Isikan volume posisi untuk komoditas inventori/persediaan yang bersesuaian pada 31 Desember 2016.

Kolom (7): Nilai Posisi Inventori/Persediaan 31 Desember 2016

Isikan nilai posisi untuk komoditas inventori/persediaan yang bersesuaian pada 31 Desember 2016 dalam ribu rupiah.

Kolom (8): Volume Posisi Inventori/Persediaan 31 Desember 2017

Isikan volume posisi untuk komoditas inventori/persediaan yang bersesuaian pada 31 Desember 2017.

Kolom (9): Nilai Posisi Inventori/Persediaan 31 Desember 2017

Isikan nilai posisi untuk komoditas inventori/persediaan yang bersesuaian pada 31 Desember 2017 dalam ribu rupiah.

Kolom (9): Volume Posisi Inventori/Persediaan 31 Desember 2018

Isikan volume posisi untuk komoditas inventori/persediaan yang bersesuaian pada 31 Desember 2018.

Kolom (10): Nilai Posisi Inventori/Persediaan 31 Desember 2018

Isikan nilai posisi untuk komoditas inventori/persediaan yang bersesuaian pada 31 Desember 2018 dalam ribu rupiah.

BLOK VI. CATATAN

Blok ini bertujuan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting terkait informasi yang diberikan perusahaan.

BLOK VII. KETERANGAN PETUGAS

Blok ini bertujuan untuk mengetahui keterangan identitas pencacah dan pengawas serta tanggal pelaksanaan kegiatan pencacahan dan pengawasan.

Rincian (1): Nama Petugas

Isikan nama petugas pencacah dan pengawas yang bersesuaian.

Rincian (2): Tanggal Pelaksanaan

Isikan tanggal pencacahan dan pengawasan yang bersesuaian.

Rincian (3): Tanda Tangan Petugas

Isikan tanda tangan petugas pencacah dan pengawas untuk memastikan bahwa semua isian sudah terisi dan diperiksa dengan benar.

BLOK VIII. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

Blok ini bertujuan untuk memperoleh keterangan pemberi informasi perusahaan yang mencakup nama, nomor telepon, tanda tangan pemberi informasi, dan cap perusahaan jika tersedia.

BAB III

PETUNJUK PENGAWASAN

Pada bab ini, diberikan penjelasan mengenai tata cara pemeriksaan bagi petugas pengawas pencacahan. Kegiatan pengawasan bertujuan untuk menghindari kesalahan pengisian pada kuesioner dan menjaga konsistensi isian antar blok yang berkaitan, sehingga data yang diperoleh wajar dan konsisten. Dengan demikian, hasil pencacahan kuesioner SKSPPI 2019 yang dientri diharapkan sudah dalam keadaan siap untuk diolah lebih lanjut. Secara umum, hal-hal yang perlu diperiksa oleh pengawas antara lain:

1. Isian mudah dibaca dan sudah dicatat pada kolom yang benar;
2. Isian pada blok-blok yang saling terkait sudah konsisten;
3. Isian bersifat wajar;
4. Isian nilai sudah terisi dalam satuan ribu rupiah; dan
5. Isian yang diragukan perlu ditanyakan kepada pencacah dan jika perlu dilakukan pencacahan ulang.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dan diperiksa secara rinci untuk setiap blok dapat diuraikan sebagai berikut.

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

Rincian (1): Provinsi

- Nama provinsi sudah terisi dengan benar.
- Kode provinsi sudah sesuai dengan nama provinsi yang ditulis dan MFD Semester I 2018.

Rincian (2): Kabupaten/Kota

- Nama kabupaten/kota sudah terisi dengan benar.
- Kode kabupaten/kota sudah sesuai dengan nama kabupaten/kota yang ditulis dan MFD semester I 2018.

Rincian (3): Nomor Urut Perusahaan

- Nomor urut perusahaan diisi oleh petugas BPS kabupaten/kota.
- Nomor urut perusahaan sudah terisi dengan benar dan tidak ada pengulangan.

Rincian (4): Nama Perusahaan

- Nama perusahaan sudah terisi dengan lengkap dan benar.

Rincian (5): Alamat Kantor dan No. Telepon

- Alamat dan nomor telepon sudah terisi dengan lengkap dan benar.

BLOK II. KETERANGAN UMUM

Rincian (1): Kegiatan Usaha yang Dilakukan

- Deskripsi kegiatan usaha harus terisi dengan lengkap dan jelas.
- Kode kegiatan usaha sudah terisi sesuai dengan deskripsi kegiatan usaha.

Rincian (2): Tahun Dimulainya Kegiatan Usaha

Tahun dimulainya kegiatan usaha harus terisi dengan benar.

Rincian (3): Bentuk Badan Hukum/Usaha Perusahaan

Bentuk badan hukum/usaha hanya terisi salah satu klasifikasi.

Rincian (4): Jenis Perusahaan berdasarkan Kepemilikan

Jenis perusahaan hanya terisi salah satu klasifikasi.

BLOK III. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN DAN ASET TAHUN 2016-2018

Kolom (2) Rincian (1): Nilai Produksi/Pendapatan Tahun 2016

Nilai produksi/pendapatan selama tahun 2016 sudah terisi dengan wajar dalam ribu rupiah.

Kolom (3) Rincian (1): Nilai Produksi/Pendapatan Tahun 2017

Nilai produksi/pendapatan selama tahun 2017 sudah terisi dengan wajar dalam ribu rupiah.

Kolom (4) Rincian (1): Nilai Produksi/Pendapatan Tahun 2018

Nilai produksi/pendapatan selama tahun 2018 sudah terisi dengan wajar dalam ribu rupiah.

Kolom (2) Rincian (2): Nilai Produksi/Pendapatan Triwulan IV Tahun 2016

Nilai produksi selama triwulan IV tahun 2016 sudah terisi dengan wajar dalam ribu rupiah.

Kolom (3) Rincian (2): Nilai Produksi/Pendapatan Triwulan IV Tahun 2017

Nilai produksi selama triwulan IV tahun 2017 sudah terisi dengan wajar dalam ribu rupiah.

Kolom (4) Rincian (2): Nilai Produksi/Pendapatan Triwulan IV Tahun 2018

Nilai produksi selama triwulan IV tahun 2018 sudah terisi dengan wajar dalam ribu rupiah.

Kolom (2) Rincian (3): Nilai Aset Tahun 2016

Nilai aset pada tahun 2016 sudah terisi dengan wajar dalam ribu rupiah. Nilai aset harus lebih besar dari nilai persediaan.

Kolom (3) Rincian (3): Nilai Aset Tahun 2017

Nilai aset pada tahun 2017 sudah terisi dengan wajar dalam ribu rupiah. Nilai aset harus lebih besar dari nilai persediaan.

Kolom (4) Rincian (3): Nilai Aset Tahun 2018

Nilai aset pada tahun 2018 sudah terisi dengan wajar dalam ribu rupiah. Nilai aset harus lebih besar dari nilai persediaan.

BLOK IV. NILAI POSISI INVENTORI/PERSEDIAAN AKHIR TRIWULANAN TAHUN 2016-2019

Kolom (2): Nilai Posisi Inventori/Persediaan Setiap Akhir Triwulan 1 Selama Tahun 2016-2019

Nilai posisi inventori/persediaan pada setiap triwulan 1 selama periode 2016-2019 bersifat wajar dalam ribu rupiah.

Kolom (3): Nilai Posisi Inventori/Persediaan Setiap Akhir Triwulan 2 Selama Tahun 2016-2018

Nilai posisi inventori/persediaan pada setiap triwulan 2 selama periode 2016-2018 bersifat wajar dalam ribu rupiah.

Kolom (4): Nilai Posisi Inventori/Persediaan Setiap Akhir Triwulan 3 Selama Tahun 2016-2018

Nilai posisi inventori/persediaan pada setiap triwulan 3 selama periode 2016-2018 bersifat wajar dalam ribu rupiah.

Kolom (5): Nilai Posisi Inventori/Persediaan Setiap Akhir Triwulan 4 Selama Tahun 2016-2018

Nilai posisi inventori/persediaan pada setiap triwulan 4 selama periode 2016-2018 bersifat wajar dalam ribu rupiah.

BLOK V. VOLUME DAN NILAI POSISI INVENTORI/PERSEDIAAN AKHIR TAHUN 2016-2018

Kolom (2): Nama Komoditas

- Nama komoditas sudah terisi dengan benar dan relevan dengan kegiatan usaha perusahaan pada isian Blok II Rincian 2.

Kolom (3): 3 Digit KBLI

- Isian 3 digit kode komoditas inventori sesuai KBLI 2009 dan nama komoditas inventori.

Kolom (4): Kode Satuan Volume

Kode satuan volume inventori konsisten dengan isian nama komoditas yang bersesuaian di Blok V Kolom 2 dan hanya terisi salah satu klasifikasi.

Kolom (5): Kode Jenis Inventori

Kode jenis inventori konsisten dengan isian nama komoditas yang bersesuaian di Blok V Kolom 2 dan hanya terisi salah satu klasifikasi.

Kolom (6): Volume Posisi Inventori/Persediaan 31 Desember 2016

Volume posisi inventori/persediaan sudah terisi dengan wajar sesuai dengan isian kode volume inventori di Blok V Kolom 3.

Kolom (7): Nilai Posisi Inventori/Persediaan 31 Desember 2016

- Nilai posisi inventori/persediaan pada 31 Desember 2016 untuk setiap jenis komoditas bersifat wajar sesuai dengan besarnya volume posisi inventori pada Blok V Kolom 5.
- Nilai posisi inventori/persediaan pada 31 Desember 2016 harus konsisten dengan isian nilai posisi inventori/persediaan akhir triwulan 4 di tahun 2016, yakni total Blok V Kolom (7) = Blok IV Kolom (5) Tahun 2016.

Kolom (8): Volume Posisi Inventori/Persediaan 31 Desember 2017

Volume posisi inventori/persediaan sudah terisi dengan wajar sesuai dengan isian kode volume inventori di Blok V Kolom 3.

Kolom (9): Nilai Posisi Inventori/Persediaan 31 Desember 2017

- Nilai posisi inventori/persediaan pada 31 Desember 2017 untuk setiap jenis komoditas bersifat wajar sesuai dengan besarnya volume posisi inventori pada Blok V Kolom 7.
- Nilai posisi inventori/persediaan pada 31 Desember 2017 harus konsisten dengan isian nilai posisi inventori/persediaan akhir triwulan 4 di tahun 2017, yakni total Blok V Kolom (9) = Blok IV Kolom (5) Tahun 2017.

Kolom (10): Volume Posisi Inventori/Persediaan 31 Desember 2018

Volume posisi inventori/persediaan sudah terisi dengan wajar sesuai dengan isian kode volume posisi inventori di Blok V Kolom 3.

Kolom (11): Nilai Posisi Inventori/Persediaan 31 Desember 2018

- Nilai posisi inventori/persediaan pada 31 Desember 2018 untuk setiap jenis komoditas bersifat wajar sesuai dengan besarnya volume posisi inventori pada Blok V Kolom 5.
- Nilai posisi inventori/persediaan pada 31 Desember 2018 harus konsisten dengan isian nilai posisi inventori/persediaan akhir triwulan 4 di tahun 2018, yakni total Blok V Kolom (11) = Blok IV Kolom (5) Tahun 2018.

BLOK VI. CATATAN

Keterangan yang tertulis di catatan harus sesuai dengan blok atau isian yang berkaitan dengan keterangan tersebut.

BLOK VII. KETERANGAN PETUGAS

Rincian (1): Nama Petugas

Nama petugas pencacah dan pengawas sudah terisi dengan lengkap dan benar.

Rincian (2): Tanggal Pelaksanaan

Tanggal pencacahan dan pengawasan sudah terisi dengan benar. Tanggal pencacahan harus lebih awal atau sama dengan tanggal pengawasan.

Rincian (3): Tanda Tangan Petugas

Tanda tangan petugas pencacah dan pengawas sudah terisi dengan lengkap sebagai bukti bahwa seluruh isian sudah terisi dengan lengkap dan benar.

BLOK VIII. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

Nama dan nomor telepon harus terisi untuk memudahkan konfirmasi terhadap ketidakwajaran data yang diperoleh. Selain itu, tanda tangan pemberi informasi juga harus terisi untuk menunjukkan bahwa informasi tersebut benar-benar diperoleh dari pemberi informasi yang tertulis.



BADAN PUSAT STATISTIK
Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Kotak Pos 1003, Jakarta 10010
Telepon: (021) 3841195, 3842508, 3810291-5, Fax: (021) 3857046,
Homepage : http://www.bps.go.id e-mail: bpshq@bps.go.id